

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan memiliki akibat dapat dikenakan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Apabila dalam perngaturan suatu tindak pidana terdapat sebuah celah maka dapat digunakan oleh pelaku lolos dari jerat hukum yang seharusnya berlaku padanya. Pemenuhan unsur tindak pidana perjudian yang di dasarkan pada unsur jual beli tindak pidana narkoba dirasa perlu guna memberikan kepastian penegakan hukum dan menutup kemungkinan terdapatnya celah bagi pelaku tindak pidana lolos dari ancaman pidana.
2. Keberadaan dari pasal peraturan perundang-undangan terkait perjudian yang telah ada pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian saat ini. Seperti pada contoh kasus yang terdapat dalam penelitian skripsi ini. Apabila dilakukan peninjauan terhadap unsur pasal yang digunakan dengan fakta hukum dalam perkara maka hukum dapat ditegakkan, namun apabila muncul delik pidana baru yang belum diatur dalam pasal yang telah ada maka hal tersebut menjadi satu kekosongan hukum yang dapat di salah gunakan.

1.2 Saran

1. Hendaknya unsur baru mengenai jual beli dalam tindak pidana perjudian dimasukkan ke dalam rumusan pasal-pasal dari Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian. Hal tersebut menjadi guna

menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang belum dapat dilihat saat ini. Apabila terdapat kekurangan unsur dalam suatu rumusan pasal dari Undang-Undang dapat mengakibatkan kekosongan hukum. kekosongan hukum berhubungan erat dengan asas legalitas dan kepastian hukum yang mana mengakibatkan seseorang yang seharusnya melakukan tindak pidana menjadi tidak melakukan tindak pidana akibat tidak terdapat pasal yang mampu menjerat pelaku. Keberadaan dari unsur jual beli juga sudah ada sebelumnya dalam tindak pidana narkoba sehingga hal tersebut menjadikan kepastian hukum yang terdapat dalam tindak pidana narkoba menjadi semakin terang.

2. Hendaknya pada lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan pengendalian aplikasi-aplikasi yang dijalankan secara *online* memberikan kontrol dan pembatasan yang lebih ketat terhadap aplikasi sejenis Higgs Domino yang kemudian dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian. Kontrol dan pembatasan juga dilakukan pada akses yang memiliki hubungan tidak langsung dengan tindak pidana perjudian seperti keberadaan *virtual private network* (VPN). Untuk menghindari kerugian dan merosotnya moral anak bangsa, maka hal tersebut diperlukan. Selain dari lembaga yang berwenang, masyarakat juga harus bersikap aktif dalam melindungi moral dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya pada lingkungan tempat tinggal masing-masing.